

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap. Lawrence J. Saha 2006

Menurut James A. Bank 2008 pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan itu sangat diperlukan terutama oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia, untuk melakukan rekontruksi sosial dengan mengembangkan *civic skill*, yakni keterampilan menjadi warga dari masyarakat demokratis yang di antaranya mampu bersikap toleran dan mengakomodasi berbagai jenis perbedaan untuk kesejahteraan bersama.

Pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek: konsep, gerakan, dan proses. Dari aspek konsepnya, pendidikan multikultural dipahami

sebagai ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras mereka, dan atau karakteristik-karakteristik kultural lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Dari aspek gerakannya, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi- institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok- kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga aspek lain seperti metode, strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan sekolah.

Dari aspek prosesnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa. Kesetaraan pendidikan, seperti kemerdekaan dan keadilan tidak mudah dicapai, karena itu proses ini harus berlangsung terus-menerus. Sementara itu, tujuan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam tujuan, yaitu: tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek sikap (*attitudinal goals*) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsive terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek pengetahuan (*cognitive goals*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran

perspektif kultural. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran (*instructional goals*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural.

Multikulturalisme merupakan suatu paham atau situasi-kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sebagai sebuah paham menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Multikulturalisme bukan sekedar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini, tetapi juga telah merupakan tuntutan dari berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut. Multikulturalisme merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku (etnis), dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Pendidikan apapun bentuknya,

tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan kewarganegaraan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional.

Ada tiga tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu:

1. Agama, suku bangsa dan tradisi

Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Bagaimanapun juga hal itu akan menjadi perusak kekuatan masyarakat yang harmonis ketika hal itu digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi. Di dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat. Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama.

2. Kepercayaan

Unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya resiko dari kecurigaan atau ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat atau plural.

3. Toleransi

Toleransi merupakan bentuk tertinggi, bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah. Sehingga dalam toleransi, tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural.

Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu:

1. Sarana alternatif pemecahan konflik

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam unsur sosial dan budaya. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial- budaya.

Struktur kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Pada kenyataannya pendidikan multikultural belum digunakan dalam proporsi yang benar. Maka, sekolah dan perguruan tinggi sebagai instirusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural

dengan model masing-masing sesuai dengan otonomi pendidikan atau sekolahnya sendiri. Model-model pembelajaran mengenai kebangsaan memang sudah ada. Namun, hal itu masih kurang untuk dapat menghargai perbedaan masing-masing suku, budaya maupun etnis. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai konflik dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hal ini berarti bahwa pemahaman mengenai toleransi di masyarakat masih sangat kurang. Maka, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk pada diri setiap peserta didik sikap saling toleransi, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya.

Menurut Stephen Hill, pendidikan multikultural dikatakan berhasil apabila prosesnya melibatkan semua elemen masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya multidimensi aspek kehidupan yang tercakup dalam pendidikan multikultural. Perubahan yang diharapkan adalah pada terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA.

2. Agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya

Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya, saat ia berhubungan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi. Pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi 'ancaman' serius bagi peserta didik. Untuk

menyikapi realitas tersebut, peserta didik tersebut hendaknya diberikan pengetahuan yang beragam. Sehingga peserta didik tersebut memiliki kemampuan global, termasuk kebudayaan. Dengan beragamnya kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyak budaya, agar siswa tidak melupakan asal budayanya. Menurut Fuad Hassan, saat ini diperlukan langkah antisipatif terhadap tantangan globalisasi, terutama dalam aspek kebudayaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dapat memperpendek jarak dan memudahkan adanya persentuhan antar budaya. Tantangan dalam dunia pendidikan kita, saat ini sangat berat dan kompleks. Maka, upaya untuk mengantisipasinya harus dengan serius dan disertai solusi konkret. Jika tidak ditanggapi dengan serius terutama dalam bidang pendidikan yang bertanggung jawab atas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka, peserta didik tersebut akan kehilangan arah dan melupakan asal budayanya sendiri. Sehingga dengan pendidikan multikultural itulah, diharapkan mampu membangun Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Karena keanekaragaman budaya dan ras yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan.

3. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional

Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan

ukuran dan tingkatan tertentu. Pengembangan kurikulum yang berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku secara serentak seperti sekarang menjadi filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan.
- b. Harus merubah teori tentang konten (curriculum content) yang mengartikannya sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori, generalisasi, menuju pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan (skills) yang harus dimiliki generasi muda.
- c. Teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
- d. Proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi yang positif. Dengan cara tersebut, perbedaan antarindividu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa untuk hidup dengan keberanekaragaman budaya.
- e. Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.

4. Menuju masyarakat Indonesia yang Multikultural

Corak masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika bukan hanya merupakan keanekaragaman suku bangsa saja melainkan juga

menyangkut tentang keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberanekaragaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar kebudayaan satu sama lain.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lain yang relevan

B. Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah rangkaian proses yang berisi semua pengaruh positif dengan tujuannya guna membentuk pandangan warga negara tentang peran masyarakat dalam masyarakat. Hasil Seminar Pendidikan dan Pendidikan Warga Nasional yang diselenggarakan di Tawangmangu juga menunjukkan bahwa sebagai program pendidikan, tujuan utama kewarganegaraan adalah menumbuhkembangkan warga negara yang lebih baik berdasarkan kondisi, standar dan standar ukuran, serta regulasi pendidikan kewarganegaraan terbuka, warga negara dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan yang dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu bidang penelitian yang misinya

mencerdaskan bangsa Indonesia dengan slogan “*pendidikan berbasis nilai*”. Konstruksi atas sistem kewarganegaraan didasarkan pada sudut pandang atau paradigma diantaranya: *Pertama*, kewarganegaraan disusun atas tema pembelajaran kurikulum yang tujuannya guna pengembangan potensi diri dan menjadikannya bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, partisipatif, serta mempunyai tanggung jawab. *Kedua*, secara teori kewarganegaraan disusun sebagai mata pelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, emosional, serta psikomotorik dimana menyatu dalam pemikiran, konsep, nilai serta moral Pancasila, kewarganegaraan demokratis dan esensi negara, atau saling menembus dan membaur. pertahanan. *Ketiga*, warga negara secara praktis dirancang sebagai mata pelajaran yang mengedepankan konten yang menanamkan nilai dan pengalaman belajar, berupa berbagai tingkah laku yang perlu direfleksikan di kesehariannya, dan menjadi jalan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Lebih jauh menggambarkan keberlangsungan sosial dari perspektif pemikiran, konsep, nilai serta moral Pancasila, warga negara demokratis serta pertahanan negara.

PKn merupakan skema pendidikan yang berpusat pada demokrasi politik yang berkembang dengan berkembangnya sumber-sumber ilmu lain, dan berdampak besar bagi masyarakat, pendidikan sekolah serta orang tua. Agar berdampak positif, semua ini telah dilatihkan untuk melatih siswa berpikir kritis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertindak secara demokratis untuk mempersiapkan kehidupan yang demokratis.

Atas beberapa penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa warga negara belajar guna pembentukan warga negara yang mempunyai akhlak mulia, dapat menjalankan hak juga kewajibannya sebagai warga negara, serta dapat mempunyai peran dalam bermasyarakat. Untuk Pendidikan kewarganegaraan yang sekarang ada di Indonesia memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di tumbuh kembangkan dalam tradisi Citizenship Education yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Seperti dijelaskan pusat kurikulum, Kewarganegaraan mempunyai tujuan untuk memberikan kemampuan sebagai berikut:

- 1) Pikirkan secara rasional, kritis dan kreatif tentang masalah kewarganegaraan.
- 2) Berkualitas tinggi, berperan dengan bertanggung jawab, dan bertindak bijak dalam kegiatan kemasyarakatan, nasional, dan kenegaraan.
- 3) Berkembang secara demokratis dan positif, membentuk diri Anda dengan karakter bangsa Indonesia, dan memungkinkan mereka untuk hidup bersama negara lain
- 4) Berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung Bersama negara lain di dunia melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Hidup kita dijamin oleh konstitusi
- 2) Budaya nasional menurut konstitusi
- 3) Tingkatkan kesadaran sipil dengan pendidikan serta pertukaran politik
- 4) Pendidikan guna (untuk) warga negara yang mempunyai tanggung jawab.
- 5) Latihan demokratis
- 6) Berpartisipasi dengan sungguh-sungguh dalam urusan public
- 7) Sekolah diibaratkan laboratoriumnya demokrasi
- 8) Rangkaian proses Keputusan
- 9) Praktik kepemimpinan
- 10) Pengawasan demokratis pada badan legislatif dan juga eksekutif.
- 11) Mempromosikan pemahaman dan kerjasama internasional

Adapun tujuan pembelajaran PKn adalah sebagai berikut :

- 1) Secara umum tujuan PKn harus mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional yaitu: Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- 2) Secara khusus PKn bertujuan untuk : membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku

yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi umunya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang kritis dan warga negara partisipatif. Warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibilities*) mengandung arti bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhannya, terhadap manusia lain, terhadap lingkungan alam, serta masyarakat dan bangsa dan negaranya. Warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) dalam arti cerdas secara moral, cerdas secara spiritual, dan cerdas emosional. Warga negara yang kritis adalah warga negara yang memiliki kepekaan tinggi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya, serta kemauan kuat dalam memberikan alternative pemecahan masalah tersebut. Kemudian warga negara yang partisipatif yakni warga negara yang penuh kesadaran yang tinggi untuk melibatkan diri atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, mengingat

membuat keputusan merupakan salah satu kompetensi atau kemampuan dasar warga negara. Adapun kemampuan dasar lainnya adalah memperoleh informasi serta menggunakan informasi, ketertiban, berkomunikasi, kerjasama, dan melakukan berbagai macam kepentingan secara benar.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajiban sebagai individu warga negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah masyarakat secara cerdas sesuai dengan fungsi dan peranannya (*socially sensitive, socially responsible, dan socially intelligence*), memiliki disiplin pribadi, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan masyarakat yang baik (*socio civic behavior dan desirable personal qualities*).

Tujuan utama dari kehendak negara yang memprogramkan pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya adalah untuk mengembangkan warga negara yang mengenal, menerima, dan menghayati serta menyadari perannya sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab yang berkenaan dengan peradaban dan moral dalam kehidupan masyarakat yang demokratis seperti perilakunya diatur oleh prinsip-prinsip moral dalam segala situasi. Secara singkat tujuan yang terfokus pada status kewarganegaraannya adalah untuk pengembangan pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap pembentukan suatu masyarakat yang adil dan mampu melindungi orang atau makhluk lain dari kekejaman dan sebagai bangsa yang merdeka dan

demokratis. Di beberapa negara, tujuan ini didukung oleh Undang Undang Dasar, Ketetapan dan peraturan negara masing-masing.

Atas dasar tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan di atas, maka fungsi PKn dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat
- 2) Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
- 3) Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antar warga negara dengan sesama warga negara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui serta mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Pembelajaran PKn akan membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, pemerintahan, nilai-moral budaya bangsa sebagai identitas bangsa, nasionalisme, ekonomi dan nilai-nilai masyarakat lainnya; pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang memiliki identitas/ jati diri sebagai bangsa Indonesia; pengayaan sumber belajar, bahwa sumber belajar tidak hanya di dalam kelas dan dari buku teks,

melainkan diperkaya dengan pengalaman belajar mandiri dari peserta didik yang relevan, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat, yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dan menemukan sendiri bagaimana berperan serta dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara dengan menggunakan berbagai media sebagai hasil teknologi; keteladanan dari nilai-nilai dan prinsip yang dikembangkan dalam PKn melalui sikap dan perilaku sehari-hari sehingga peserta didik memiliki panutan dalam mewujudkan perilaku yang diharapkan; hidup bersama dengan orang lain sebagai satu bangsa, bahwa mata pelajaran PKn termasuk dalam rumpun PIPS, menekankan bagaimana manusia sebagai warga negara dapat bekerja sama dengan orang lain, saling menghormati, menghargai, damai dan cita-cita bangsa.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi issue kewarganegaraan;
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya;
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Apa yang dikemukakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut terlihat bahwa anak didik dipersiapkan untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis, rasional dan kreatif yang diwujudkan dalam partisipasinya sebagai warganegara yang mempunyai identitas kebangsaan yang kuat, di tengah-tengah masyarakat internasional.

C. Perlunya Pendidikan Multikultural di Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ada tujuh alasan mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan dan dijadikan model pendidikan khusus dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia: *Pertama*, realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama, dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. *Kedua*, pluralitas tersebut secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. *Ketiga*, masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. *Keempat*, masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan hak setiap orang. *Kelima*, pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesewenang-wenangan. *Keenam*,

pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejala masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. *Ketujuh*, pendidikan multikultural sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kealaman, dan ke-Tuhanan.

Pendidikan multikultural diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan karena pendidikan kewarganegaraan itu sendiri merupakan program dan rekayasa pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat/mantap, sadar dan mampu membina dan melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat bangsa dan negaranya, taat asas/ketentuan (*rule of law*), demokratis, dan partisipasi aktif-kreatif-positif dalam *kebhinnekaan* kehidupan masyarakat-bangsa-negara madani (*civil society*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang terbuka-mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati dirinya.

Oleh karenanya, pendidikan multikultural harus menjadi sinergi dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam pendidikan multikultural, tidak akan ada pembedaan kebutuhan, baik yang bersifat intelektual, spritual, material, emosional, etika, estetika, sosial, ekonomi, budaya, dan transendental dari seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai ragam stratanya.

Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola berbagai kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang

muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Pendidikan multikultural mengandaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai suatu simulasi arena hidup nyata yang plural, terus berubah dan berkembang. Institusi sekolah dan kelas adalah wahana hidup dengan pemeran utama peserta didik di saat guru dan seluruh tenaga kependidikan berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dikelola sebagai dialog dan pengayaan pengalaman hidup unik, sehingga bisa tumbuh pengalaman dan kesadaran kolektif setiap warga dan peserta didik yang kelak menjadi dasar etika politik berbasis etika kewargaan.

Pendidikan multikultural didasari konsep kebermaknaan perbedaan secara unik pada tiap orang dan masyarakat. Kelas disusun dengan anggotakan kecil hingga tiap peserta didik memperoleh peluang belajar semakin besar sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif di antara peserta didik. Pada tahap lanjut menumbuhkan kesadaran kolektif melampaui batas teritori kelas, kebangsaan dan nasionalitas, melampaui teritori teologi keagamaan dari tiap agama berbeda.

Gagasan itu didasari asumsi, tiap manusia memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup unik dan berbeda-beda. Perbedaan adalah identitas terpenting dan paling otentik tiap manusia daripada kesamaannya. Kegiatan belajar-mengajar bukan ditujukan agar peserta didik menguasai sebanyak mungkin materi ilmu atau nilai, tetapi bagaimana tiap peserta didik

mengalami sendiri proses berilmu dan hidup di ruang kelas dan lingkungan sekolah.

Karena itu, guru tidak lagi ditempatkan sebagai aktor tunggal terpenting sebagai kamus berjalan yang serba tahu dan serba bisa. Guru yang afisien dan produktif ialah jika bisa menciptakan situasi sehingga tiap peserta didik belajar dengan cara sendiri yang unik. Kelas disusun bukan untuk mengubur identitas personal, tetapi memperbesar peluang tiap peserta didik mengaktualkan kedirian masing-masing. Pendidikan sebagai transfer ilmu dan nilai tidak memadai, namun bagaimana tiap peserta didik menemukan dan mengalami situasi beriptek dan berkehidupan otentik.

Gagasan pendidikan multikultural bersumber dari prinsip martabat keunikan diri tiap peserta didik. Pendidikan formal (sekolah) seperti demokrasi yang meletakkan suara rakyat sebagai suara Tuhan. Rakyat sebagai diri lebih penting dari realitas negara dan partai seperti dalam masyarakat sipil atau madani. Kegiatan belajar-mengajar bukan sebagai alat sosialisasi atau indoktrinasi guru, tetapi wahana dialog dan belajar bersama. Di saat yang sama institusi negara dan partai dikembangkan sebagai wahana aktualisasi dan representasi kepentingan rakyat.

Soalnya ialah bagaimana memanipulasi kelas sebagai wahana kehidupan nyata dan membuat simulasi sehingga tiap peserta didik berpengalaman berteori ilmu dan menyusun sendiri nilai kebaikan. Guru tidak lagi sebagai gudang (bankir) ilmu dan nilai yang tiap saat siap diberikan kepada peserta didik, tetapi sebagai teman dialog dan partner menciptakan situasi beriptek dan

bersosial. Pembelajaran di kelas disusun sebagai simulasi kehidupan nyata sehingga peserta didik berpengalaman hidup sebagai warga masyarakatnya.

Dengan adanya pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan maka diharapkan akan mengubah tingkah laku individu agar tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas. Selain itu, juga diharapkan akan menumbuhkan toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain.

Yang menjadi permasalahan dalam menerapkan pendidikan multikultural dalam pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan di Indonesia kebanyakan masih berciri “pendidikan bergaya bank” sehingga perlu adanya perubahan paradigma seperti dikemukakan sebagai berikut:

- a. Siswa harus dianggap sebagai manusia yang utuh, yang punya naluri, kesadaran, kepribadian, eksistensi, dan keterbatasan. Atas dasar tersebut maka siswa akan mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungannya
- b. Perlunya diubah antagonis pendidikan di Indonesia sebagai “pendidikan bergaya bank”, seperti: guru mengajar, murid belajar; guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa; guru berpikir, murid dipikirkan; guru bicara, murid mendengarkan; guru mengatur, murid diatur; guru memilih dan memaksakan kehendaknya, murid menuruti; guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya; guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri; guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang

profesionalismenya dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid; guru adalah subyek proses belajar, murid objeknya.

- c. Guru dan Siswa harus saling belajar serta saling memanusiakan, sehingga hubungan keduanya merupakan subjek-subjek, bukan subjek-objek;
- d. Siswa harusnya menjadi subjek yang belajar, bertindak dan berpikir serta berbicara mengenai hasil tindakan dan pemikirannya.
- e. Guru harusnya tidak bersifat masih bangga dengan peran reaksionernya yang gembira yaitu peran yang masih konservatif dan unkreatif.

Hal semacam itu akan bisa menjadi suatu kenyataan apabila tentu saja salah satunya didukung oleh adanya kompetensi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Beberapa kompetensi yang dipersyaratkan mutlak dimiliki oleh seorang guru adalah: pertama, mampu menjelaskan dan meyakinkan siswa untuk memahami maksud dan tujuan dari materi yang akan diajarkan; kedua, mampu berperan dan berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing dalam melayani keperluan siswa saat mengikuti proses belajar mengajar; ketiga, mampu mengembangkan metode pendekatan belajar mengajar individual, interaktif dan kolaboratif untuk menciptakan siswa aktif; keempat, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan di dalam dan di luar kelas; kelima, dalam pembelajaran multikultural seorang guru harus menjelmakan dirinya sebagai seorang pribadi antar budaya, dan lain-lain; keenam, mampu mengembangkan komunikasi yang efektif (lugas dan luwes), dalam *Konsep* membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka; dan ketujuh, mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh.

D. Kewarganegaraan global

Kewarganegaraan global dapat ditinjau dari berbagai pandangan ideologi dunia yang mempengaruhi makna/konsep maupun keberadaan kewarganegaraan global dalam kehidupan masyarakat dunia. Ideologi-ideologi ini terdiri dari globalisme, nasionalisme, internasionalisme, transnasionalisme, kosmopolitanisme pasca-kolonialisme, dan indigenisme. Setiap ideologi mempengaruhi makna dan keberadaan kewarganegaraan global sesuai dengan pendekatan dan penekanan masing-masing paham dan pemikirannya.

Pertama, globalisme. Implikasi pandangan globalisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global ialah sebagai tuntutan bagi warga negara dunia untuk menjaga ruang keterbukaan, ruang partisipasi dalam masyarakat, mendorong agenda emansipatoris, perjuangan sosial dan transformasi masyarakat (Schreiber-Barsch, 2018: 124). Kemudian, implikasi untuk pendidikan bagi kewarganegaraan global meliputi empat aspek; 1) dampak politik global, seperti contohnya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menguatkan konsep hak asasi manusia; 2) membangun kesetaraan; 3) menentukan kerangka kerja global maupun lokal terkait dengan partisipasi yang diharapkan dan dengan cara apa akses untuk terlibat dapat diberikan; 4) menekankan kekuatan transformatif untuk diakui sebagai warga negara di ruang publik (Schreiber-Barsch, 2018: 124-126).

Kedua, ideologi nasionalisme. Menurut Kymlicka (2002: 222) nasionalisme merupakan gerakan-gerakan politik dan kebijakan publik yang memandang bahwa negara-negara merupakan “negara-bangsa” di mana negara dan bangsa itu terjadi pada waktu yang sama/bersamaan. Implikasi pandangan nasionalisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global ialah warga negara dunia harus memberikan kesetiaan bukan hanya pada bentuk pemerintahan (negara), tetapi juga kepada komunitas moral yang dibentuk oleh kemanusiaan semua manusia. Hal ini karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Nussbaum (Ide, 2018: 143-144) bahwa pada dasarnya komunitas moral lebih besar daripada komunitas nasional manapun.

Ketiga, ideologi internasionalisme. Menurut Byram (Isaacs, 2018: 151) internasionalisme dapat dipahami sebagai ikatan internasional masyarakat dunia yang mengesampingkan negara bagian, bangsa, dan kelompok orang. Internasionalisme memiliki orientasi pemikiran atau pandangan untuk mengatasi batas-batas negara-bangsa dan menghindari kesetiaan buta pada satu negara bangsa. Hal ini untuk menghilangkan egoisme, prasangka, dan kemelekan nasionalis kaum muda. Kaum muda diberikan persiapan mental melalui pendidikan bagi kewarganegaraan global untuk hidup dalam komunitas internasional dan ekonomi global. Terdapat tiga implikasi pandangan internasionalisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global, yaitu konsep globalisasi, interkonektivitas global, dan kewarganegaraan lintas budaya. Berikut uraian implikasi tersebut; konsep globalisasi membuka perdebatan tentang teori sistem dunia

(konektivitas terjadi melalui perkembangan terus menerus dan pertukaran barang, ide, uang, manusia dan media); interkonektivitas global menciptakan imajinasi sosial yang lebih luas dengan memberikan subjektivitas melalui pilihan pribadi yang lebih besar, masuk ke komunitas warga global; kewarganegaraan lintas budaya mendorong komunikasi/dialog di antara kelompok-kelompok dengan bahasa dan budaya yang berbeda di dalam, dan melintasi batas negara-bangsa.

Keempat, ideologi transnasionalisme. Studi ideologi transnasionalisme dalam ilmu sosial pada dasarnya bidang penelitian baru, sehingga kurang berteori, meskipun bukan sebuah fenomena baru. Transnasionalisme muncul dari pengalaman migran sebagai inti mobilitas global. Transnasionalisme memungkinkan cara berpikir baru tentang hubungan antara kewarganegaraan global dan migrasi. Implikasi pandangan transnasionalisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global ialah merumuskan konsep kewarganegaraan yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas identitas nasional atau afiliasi politik. Transnasionalisme adalah konsep yang berfokus pada praktik dan jaringan lintas batas. Melalui transnasionalisme meningkatkan kapasitas pendidikan untuk membayangkan bentuk-bentuk baru identitas, kebangsaan dan kewarganegaraan. Perhatian utamanya berupa promosi untuk mendorong perkembangan nilai-nilai perdamaian, toleransi, saling pengertian, dan mengembangkan kapasitas untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan (Soong, 2018: 173).

Kelima, ideologi kosmopolitanisme. Gagasan inti dari paham kosmopolitanisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global adalah di mana rasa kemanusiaan dan rasa saling menghormati dapat terjadi di antara orang yang berbeda, terlepas dari kelas, ras, jenis kelamin, dan kepercayaan. Kosmopolitanisme menyajikan sosialisasi kehidupan yang sesuai dengan munculnya tatanan kebebasan, keramahan, toleransi, dan hak-hak kewarganegaraan tanpa batas.

Keenam, ideologi post-kolonialisme. Esensi dari paham post-kolonialisme adalah mengajak untuk menghidupkan kembali dan melindungi kehidupan-kehidupan yang secara historis telah ditundukkan oleh kekerasan kolonial. Dalam pandangan post-kolonialisme pendidikan dan kewarganegaraan global sebagai salah satu dekolonisasi, termasuk memberikan analisis kritis tentang bagaimana ketidaksetaraan muncul.

Ketujuh, ideologi indegenitas. Pandangan pendukung ideologi indegenitas memandang bahwa isu kemunculan kewarganegaraan global akan berpotensi membuat pengetahuan lokal terancam. Namun, ideologi ini mendukung pendidikan untuk kewarganegaraan global apabila melegitimasi pengetahuan lokal.

E. Penelitian Relavan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agil Nanggala dengan judul “Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multicultural” Jurnal Soshum Insentif 3.2 (2020): 197-210.

Realita kemultikulturalan bangsa Indonesia, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rasionalisasi, pentingnya mengoptimalkan peran pendidikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, proses analisis data berupa: reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Pendidikan Kewarganegaraan mampu berperan sebagai pendidikan multikultural, karena tujuan dan struktur keilmuannya sangat mendukung, khususnya untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta didik, agar secara sukarela menjaga kemultikulturalan bangsa, 2) Pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk moralitas peserta didik, agar secara sadar dan penuh komitmen untuk merawat kemultikulturalan bangsa, karena sebagai bentuk keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, serta implementasi nyata dari konsep warga negara yang baik dan cerdas..

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lara Sati, Dinie Anggareni Dewi dengan judul *“Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pendidikan Multikultural”*, Jurnal Pendidikan Tambusai 5 (1), 904-910, 2021.

PKn berbasis pendidikan multikultural (PKn) merupakan disiplin ilmu yang menanamkan prinsip-prinsip multikulturalisme. Dalam kehidupan berbangsa Indonesia diharapkan prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada peserta didik dalam lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan dan kehidupan berbangsa, sehingga mereka bisa menjadi warga yang demokrasi, warga negara

yang bertanggung jawab, menghormati keragaman dan bertahan dalam keragaman. Warga negara berbasis multikulturalisme memupuk paradigma keberagaman dengan tetap menghargai perbedaan, perbedaan individu (tubuh, jenis kelamin, usia, warna kulit, dan tinggi badan), serta perbedaan budaya, sosial, agama, bahasa, suku, dan kelompok. Warga negara yang berlandaskan multikulturalisme memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga keberagaman tidak akan menjadi sumber konflik, tetapi sebagai dasar toleransi dan saling menghormati untuk membangun kebhinekaan bangsa Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aina Ristanti Pane, Maharani Ritonga, Sri Yunita, Jacobus Ndonga dengan judul *“Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar”*, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 9 (2), 1481-1491, 2024.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana pendidikan multikultural telah diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam implementasi pendidikan multikultural, serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur yang mengkaji tentang implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan

kewarganegaraan di sekolah dasar dilakukan memberikan contoh teladan yang baik dari guru tentang sikap saling menghargai antar sesama dengan tidak membeda-bedakan siswa yang satu dengan yang lainnya serta pengembangan nilai-nilai multikultural di Indonesia yang telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir khususnya dalam mata pelajaran PKn yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai keberagaman, kemampuan berempati, dan keterampilan sosial, pelatihan guru dalam menghadapi keberagaman budaya untuk memastikan bahwa mereka dapat secara efektif mengimplementasikan kurikulum yang dirancang untuk pendidikan multikultural, serta pembentukan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman.